

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELESTARIAN HUTAN LINDUNG DI KOTA TARAKAN

SUHARYANI¹, PARAKKASI TJAIIJA², MUHAMMAD TAHIR³.

¹⁾ Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

²⁾ Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

³⁾ Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

ABSTRACT

The need of land becomes the main cause of degradation in the forest area. Local government's desire to preserve the forests face challenges due to various interest. The research is undertaken through a qualitative method approach using case study. The research involves nine informants. Data are collected through observation, interviews and documents. The data are analyzed in some steps such as data collection, data reduction, data presentation, verification and conclusion. The research results indicate that the local government disseminates the policies through policy campaign. The resources used in the field for policy implementation is insufficient. Technical personnel and supervisor in the field has fit with their competencies. The bureaucratic structure in term of coordination among the parties involved in the implementation of policies for the forest conservation for forest farmer groups is going well.

Keywords: *policy implementation, preservation, forest*

ABSTRAK

Kebutuhan akan lahan menjadi penyebab terjadinya degradasi pada kawasan hutan. Keinginan pemerintah daerah untuk melestarikan hutan sering berbenturan dengan berbagai kepentingan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Informan penelitian sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen. Teknik analisis data melalui tahapan koleksi, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemda dalam mensosialisasikan kebijakan melalui Penyuluhan. Sumber daya pelaksanaan kebijakan dilapangan kuantitas kurang memadai. Penempatan pegawai pelaksana dilapangan petugas lapangan dan pengawas lapangan sudah sesuai dengan bidangnya. Struktur birokrasi, dimana bentuk koordinasi dan kerja sama antar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan pelestarian hutan lindung bagi kelompok tani berjalan dengan baik.

Kata kunci: *implementasi kebijakan, pelestarian, hutan*

PENDAHULUAN

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang di anugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya wajib kita syukuri. Gangguan keamanan hutan meningkat bersamaan dengan melemahnya pengawasan terhadap hutan, penambahan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Gangguan terjadi dalam bentuk pencurian kayu dan perambahan kawasan, sehingga berakibat pada terjadinya penurunan potensi hutan dan meluasnya tanaman gagal (Simon, 2004).

Pelestarian hutan merupakan salah satu upaya penting yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Tarakan dalam rangka mewujudkan visinya. Hutan lindung oleh Pemerintah atau kelompok masyarakat ditetapkan sebagai kawasan hutan untuk dilindungi agar fungsi-fungsi ekologisnya terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.

Hutan lindung Kota Tarakan seluas 6.997 hektare masih menyisihkan sedikit masalah yang harus di pikirkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, betapa tidak dari luasan tersebut tercatat 750 hektare kawasan hutan sudah digarap oleh masyarakat tanpa izin dari dinas kehutanan, pertambangan, dan energi kota Tarakan. Masyarakat yang menggarap lahan didalam kawasan hutan lindung lebih banyak digunakan untuk berkebun, disamping ada yang sudah dijadikan kawasan permukiman. Kebijakan untuk solusi atas suatu masalah sering kali tidak efektif akibat tidak cermat dalam merumuskan masalah. Dengan kata lain, kebijakan sebagai obat sering kali tidak manjur bahkan mematikan akibat diagnosa masalah atau penyakit keliru.

Masalah kebijakan mengenai nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. (Dunn, 2003).

Menurut (Putra, 2003), Mengatakan bahwa yang tidak boleh

dilupakan adalah lapangan atau lingkungan dimana kebijakan itu hidup tidaklah pernah steril dari politik.

Menurut (Subarsono, 2005: 99) Menegaskan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan public, implementor dan kinerja kebijakan publik.

Tachjan (2008, 24). Secara etimologis menjelaskan implementasi dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sehingga bila dikaitkan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Tidak berlebihan jika dikatakan implementasi adalah merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses lahirnya kebijakan (Jones, 1996: 293-294).

Menurut (Salusu, 2002) Implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul satu keputusan. Suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mencapai sasaran.

Implementasi adalah tindakan oleh individu atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan (Wahab, 1997). Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu (William N.Dunn, 2003: 132)

Implementasi kebijakan adalah cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Implementasi Kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Dengan kata lain pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui.

Menurut (Kadji, 2008: 12) Proses implementasi sering ada sistem insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik.

Dalam Teori (Edward III) mengatakan proses implementasi kebijakan publik tidak lepas dari berbagai variabel dan faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Ada empat variabel yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan public yaitu a) Komunikasi, dalam proses implementasi kebijakan variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan yang memegang peran penting adalah komunikasi. b) Sumber Daya, variabel kedua yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sumber daya apabila kurangnya sumber daya berakibat ketidak efektifan penerapan kebijakan.

Adapun indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu staf merupakan sumber daya utama dalam implementasi kebijakan. Staf yang tidak

mencukupi, memadai, atau pun tidak kompeten dibidangnya adalah penyebab sering terjadinya kegagalan dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk, yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

Wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Fasilitas dalam implementasi kebijakan merupakan faktor penting. Implementator mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa fasilitas sarana dan prasana maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. c) Disposisi, variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi atau sikap pelaksana diartikan sebagai keinginan kesepakatan dikalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan.

Adapun hal-hal penting yang perlu dicermati pada variable disposisi yaitu : pengangkatan birokrat, sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Insentif salah satu teknik yang disarankan untuk mengatsai masalah kecenderungan para pelaksana adalah memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang yang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insetif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.

d) Struktur birokrasi, Variabel yang terakhir yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan public adalah struktur birokrasi mempunyai dampak atas penerapan dalam arti bahwa penerapan itu tidak akan berhasil

jika terdapat kekurangan dalam struktur birokrasi tersebut.

Pelestarian hutan merupakan upaya melindungi hutan dari kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak dan kebakaran. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 40-45. Upaya pelestarian hutan dapat dilakukan melalui upaya *rehabilitasi* dan *reklamasi hutan*. Sumber daya hutan sebagai salah satu sumber daya yang terbarukan memiliki manfaat yang beragam bagi umat manusia baik dalam bentuk produk langsung maupun tak langsung. Sumber daya hutan Indonesia mempunyai arti penting dan strategis bagi kelangsungan pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, bahkan dapat menentukan posisi geopolitik Indonesia pada tataran global.

Hutan Indonesia yang mencakup 63 % dari luas daratan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang tak ternilai. Negara sebagai penguasa sumber daya hutan secara keseluruhan harus mampu mengelola secara benar sehingga

memberikan manfaat serbaguna bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia maupun kemaslahatan umat manusia di dunia. Karenanya sumber daya hutan wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal dan dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Ada dua macam usaha untuk mempertahankan, menjaga dan melindungi hak negara atas hutan yaitu usaha perlindungan hutan atau usaha pengamanan teknis hutan dan usaha pengamanan hutan. Usaha perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan.

Kata pelestarian berasal dari kata “lestari” berarti tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan kekal. Kemudian mendapat tambahan *pe* dan akhiran *an*, menjadi pelestarian yang berarti proses, cara, perbuatan melestarikan, perlindungan dari kemusnahan dan kerusakan, pengawetan, konservasi, pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya

dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Dalam peraturan Undang-Undang RI No 41/1999 tentang Kehutanan, "Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan yang menjadi bagian dari alam adalah hutan yang memiliki keanekaragaman dan manfaatnya masing-masing.

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian ini dua bulan yaitu Bulan November sampai Bulan Desember 2015 lokasinya di Dinas Kehutanan, pertambangan dan energi kota Tarakan.

Jenis penelitian dalam penelitian ini pendekatan kualitatif dan tipe penelitian studi kasus.

Sumber data yang digunakan yaitu Data primer data yang diperoleh di lapangan bersumber dari informan utama teknik.

Pengumpulan data primer berupa wawancara mendalam dan observasi terhadap obyek penelitian. Data sekunder berupa dokumenter bersumber dari buku-buku, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Informan Penelitian terdiri dari kelompok pemerintah, polisi kehutanan dan kelompok Tani. Jumlah informan 9 orang.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu *observasi*, *wawancara* dan *dokumentasi*. Observasi dimaksudkan untuk melihat sejauh mana pencapaian penyelenggaraan pelestarian hutan lindung di kota Tarakan, hasil observasi tersebut dijadikan bahan acuan dalam mengolah data. Wawancara dimaksudkan wawancara secara langsung terhadap informan yang dianggap dapat memberikan keterangan-keterangan, serta mampu membahas tentang permasalahan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu, catatan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Pengabsahan data dilakukan dengan *uji kredibilitas data*, data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif, bahan referensi dan member check.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Tarakan adalah kota terbesar di Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia dan juga merupakan kota terkaya ke-17 di Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah $250,80 \text{ km}^2$ dan sesuai dengan data *Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana*, kota Tarakan berpenduduk sebanyak 239.787 jiwa. Tarakan atau juga dikenal sebagai *Bumi Paguntaka*, berada pada sebuah pulau kecil. Semboyan dari kota Tarakan adalah Tarakan Kota "BAIS" (Bersih, Aman, Indah, Sehat dan Sejahtera).

Tarakan menurut cerita rakyat berasal dari bahasa tidung "Tarak"

(bertemu) dan “Ngakan” (makan) yang secara harfiah dapat diartikan “Tempat para nelayan untuk istirahat makan, bertemu serta melakukan barter hasil tangkapan dengan nelayan lain. Selain itu Tarakan juga merupakan tempat pertemuan arus muara Sungai Kayan, Sesayap dan Malinau. Kerajaan Tidung atau dikenal pula dengan nama Kerajaan Tarakan (Kalkan/Kalka) adalah kerajaan yang memerintah *Suku Tidung* di Kalimantan Utara, yang berkedudukan di pulau Tarakan dan berakhir di Salimbatu.

Sebelumnya terdapat dua kerajaan di kawasan ini, selain Kerajaan Tidung, terdapat pula *Kesultanan Bulungan* yang berkedudukan di Tanjung Palas. Berdasarkan silsilah (Genealogy) yang ada bahwa dipesisir timur pulau Tarakan yaitu di kawasan Dusun Binalatung sudah ada Kerajaan Tidung Kuno.

Riwayat-riwayat yang terdapat dikalangan suku Tidung tentang kerajaan yang pernah ada dan dapat dikatakan yang paling tua di antara riwayat lainnya yaitu dari Menjelutung di Sungai Sesayap

dengan rajanya yang terakhir bernama Benayuk.

Berakhirnya zaman Kerajaan Menjelutung karena ditimpa malapetaka berupa hujan ribut dan angin topan yang sangat dahsyat sehingga mengakibatkan perkampungan di situ runtuh dan tenggelam kedalam air (sungai) berikut warganya.

Peristiwa tersebut dikalangan suku Tidung disebut Gasab yang kemudian menimbulkan berbagai mitos tentang Benayuk dari Menjelutung. Kelompok-kelompok Suku Tidung pada zaman Kerajaan Menjelutung belum lah seperti apa yang terdapat sekarang ini, sebagaimana diketahui bahwa dikalangan Suku Tidung yang ada di Kalimantan Timur dan Utara sekarang

Visi Dan Misi Dinas Kehutanan, pertambangan dan energi kota Tarakan yaitu, Visi, Mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan, pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, Misi, meningkatkan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan, mewujudkan

pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan serta ketersediaan energi yang berwawasan lingkungan.

Dalam *Teori Edward III* mengatakan bahwa proses implementasi kebijakan publik tidak lepas dari berbagai variabel dan faktor yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Adapun masing-masing jawaban informan pada tiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut : Komunikasi sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan pemerintah dalam pelestarian hutan lindung di Kota Tarakan. Komunikasi dalam hal ini menyangkut tentang cara atau upaya dalam proses penyampaian informasi, selain pentingnya informasi sebagai pendukung dalam komunikasi, juga diperlukan proses transmisi atau penyampaian informasi, kejelasan dan konsistensi atas informasi. Proses penyampaian informasi mengenai tujuan kebijakan, yaitu terjadi antara pembuat kebijakan dan pelaksana implementasi agar apa yang

diharapkan oleh pembuat kebijakan dapat tercapai.

Implementasi kebijakan pemerintah dalam pelestarian hutan lindung di kota Tarakan bagi masyarakat (kelompok tani) dan petugas lapangan dalam penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat secara langsung maupun sekolah dan melalui media cetak dan elektronik. Selain penyampaian informasi mengenai prosedur dan tujuan program atau kebijakan, maka aspek lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu adanya kejelasan atas informasi yang disampaikan. Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan atau pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara pembuat kebijakan, pelaksana dan *target group* dalam hal ini masyarakat/kelompok tani dan petugas lapangan.

Proses penyampaian informasi antara pembuat kebijakan dengan implementor menyangkut keterkaitan

antara keputusan yang telah dibuat dengan aturan mengenai pelaksanaannya, termasuk petunjuk teknis pelaksanaan, sehingga implementor tidak mengalami kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Dengan kejelasan informasi maka akan mendukung pihak manapun dan menutup adanya kesalahpahaman yang berdampak pada hasil dari implementasi kebijakan pemerintah dalam pelestarian hutan lindung di Kota Tarakan. Informasi tentang kebijakan tersebut yang disampaikan melalui lisan dan tulisan dapat saja menimbulkan pertanyaan jelas atau tidak informasi yang disampaikan dan diterima.

Kejelasan informasi secara umum, bahwa sebenarnya masyarakat sudah mengetahui aturan dan akibat pelanggaran hutan akan tetapi masih banyak saja masyarakat yang berspekulasi menggarap lahan dikawasan hutan pada hal mereka sudah mengetahui.

Secara umum mengenai aturan dan akibat dari pelanggaran hutan. Implementasi harus konsisten,

jelas dan bersih sehingga implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan secara efektif. Informasi tentang proses implementasi mungkin telah disampaikan dengan teliti, jelas, dan konsisten tetapi jika pelaksanaan kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan implementasi kebijakan maka pengimplementasian tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Sumberdaya merupakan salah satu faktor penting dalam proses implementasi atau pelaksanaan suatu program atau kebijakan, dimana tanpa adanya dukungan dari sumberdaya yang memadai, baik itu berupa jumlah maupun kemampuan ataupun keahlian para pelaksana program atau kebijakan pelaksanaan suatu program tidak akan mencapai tujuannya. Ketersediaan sumberdaya dalam melaksanakan sebuah program atau kebijakan merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan, jika kebijakan tersebut terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan.

Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia (SDM) dari pelaksana kebijakan baik itu secara kualitas maupun kuantitasnya seperti staf yang cukup, memadai dan berkompeten dibidangnya. Selain itu dalam aspek sumber daya juga perlu didukung oleh bagaimana ketersediaan informasi guna pengambilan keputusan, kewenangan, serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program atau implementasi kebijakan pemerintah dalam pelestarian hutan lindung di kota Tarakan bahwa dengan kurangnya tenaga pengamanan maka masyarakat (kelompok tani) dapat dengan sesuka hatinya menggarap lahan dikawasan hutan lindung karna kurangnya tenaga pengamanan sehingga membuat kurangnya juga pengawasan yang dilakukan.

Informasi merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam implementasi program atau kebijakan. Informasi-informasi yang dibutuhkan oleh implementor dalam pelestarian hutan lindung di kota Tarakan bagi masyarakat (kelompok tani) mengenai pemberlakuan sanksi

apa bila melanggar sudah di atur dalam perundang-undangan. Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program atau kebijakan dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa para pelaksana dilapangan memiliki wewenang dan tanggung jawab dengan tugas yang masing-masing mereka lakukan. Baik dalam mengambil keputusan atau memecahkan masalah yang muncul dilapangan.

Salah satu faktor pendukung dari sumber daya yang juga tak kalah pentingnya dalam pelaksanaan program atau kebijakan, yaitu ketersediaan fasilitas dalam proses pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Bahwa sarana dan prasarana yang disediakan disini cukup tersedia dan begitu pun dengan pos-pos pengamanan yang disediakan belum merata. Maka pemerintah yang terkait khusus dinas kehutanan, pertambangn dan energi kota Tarakan, harus lebih memperhatikan lagi mengenai sarana dan prasarana agar pelestarian hutan lindung dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Disposisi adalah aspek yang berkaitan dengan bagaimana sikap dan dukungan para pelaksana terhadap program atau kebijakan. Dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah dalam pelestarian hutan lindung di Kota Tarakan. Dalam hal ini penempatan para pelaksananya ada yang melalui penunjukan langsung dan ada yang melalui beberapa tahap pelatihan. Diketahui bahwa penempatan pegawai pelaksana dalam hal ini petugas lapangan sudah sesuai dengan keahlian mereka karena mereka juga sudah mengikuti pelatihan-pelatihan dan juga penempatan pegawai sudah cukup karena mereka ditempatkan sesuai dengan keahlian dan gelar mereka.

Insentif bukan hanya berupa materi, tetapi dapat berupa penghargaan maupun sanksi, dimana pemberian insentif dapat terkait dengan upaya pemberian tunjangan bagi pelaksana yang menunjukkan prestasi atau pun pemberian *punishment* atau sanksi bagi yang melanggar.

Beberapa tahun terakhir ini pihak pemerintah tidak memberikan

insentif berupa tunjangan bagi para pelaksana di lapangan karena dana yang disediakan dalam pelaksanaan kebijakan ini masih kurang dalam hal ini para petugas lapangan yang berada di Kecamatan Tarakan Utara dan Kecamatan kecamatan Tarakan Timur yang menjadi objek penelitian penulis. Bahkan mereka hanya mendapat gaji pokok saja di lokasi tersebut. Bahwasanya pemberian insentif bagi para pelaksana kebijakan pelestarian hutan lindung bagi kelompok tani sangat mempengaruhi perilaku para pelaksana kebijakan dimana para pelaksana kebijakan tersebut dilapangan dalam hal ini petugas lapangan kuantitasnya masih kurang memadai. Hal ini diakibatkan karena tidak adanya insentif berupa gaji tambahan yang diberikan pihak pemerintah kepada para pelaksana (petugas lapangan) kebijakan di lapangan dalam beberapa tahun terakhir ini.

Dalam penelitian ini struktur yang dimaksud adalah *standar operatioanal system* dan *Fragmentasi* dalam pelaksanaan kebijakan. SOP atau yang menjadi

standar secara baku belum ada akan tetapi ada di atur dalam peraturan-peraturan pemerintah yang mendukung pelestarian hutan lindung. Dapat diketahui bahwa bentuk koordinasi dan kerjasama antar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan pelestarian hutan lindung, kelompok tani berjalan dengan baik, ini terlihat dengan kesigapan para pelaksana dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul ini dilihat dari tanggung jawab yang dimiliki sesuai dengan tugas dan fungsi yang mereka miliki diantaranya kerjasama yang dilakukan antara Dinas Kehutanan yaitu petugas-petugas lapangan yang mensosialisasikan langsung kebijakan ini kepada para kelompok tani di kecamatan kota Tarakan ini. Hal ini sesuai teori yang dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan bahwa adanya penyebaran tanggung jawab dari beberapa pihak dapat menyebabkan kendala, namun jika koordinasi dan kerjasama dapat dilakukan dengan baik hal tersebut tidak akan menjadi kendala dalam pelaksanaan suatu program, tetapi bisa dijadikan

kekuatan sehingga pelaksanaan suatu program dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.“di mana mencakup (kawasan) hutan lindung sebagai kawasan hutan yang memiliki sifat khas /fungsi yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.“Hutan lindung mempunyai fungsi pokok untuk menjaga kualitas lingkungan dan ekosistem. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya:a)Mencegah banjir, hutan yang terpelihara dapat menyerap air hujan agar tidak turun langsung ke daerah bawahnya. Kemampuan hutan untuk menampung air hujan merupakan pengendalian banjir yang efektif.b)Menyimpan cadangan air tanah, selain mengendalikan banjir

hutan juga bermanfaat untuk menyimpan cadangan air tanah. Cadangan air tersebut bisa digunakan ketika musim kemarau, sehingga penduduk sekitar hutan terhindar dari bencana kekeringan. c) Mencegah erosi dan tanah longsor, lahan terbuka yang diatasnya tidak tertutup hutan akan cepat tergerus erosi. Erosi akan mendangkal kan sungai-sungai yang ada dibawahnya. Selain itu juga, bagi hutan-hutan yang terdapat di lereng-lereng curam erosi bisa menyebabkan bencana tanah longsor. d) Memelihara kesuburan tanah, hutan seperti sebuah tempat pengomposan raksasa. Berbagai macam material organik akan terurai menjadi humus di dalam hutan. Humus hutan ini berfungsi sebagai pupuk yang meningkatkan kesuburan tanah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan penelitian yang diajukan dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam

pelestarian hutan lindung di kota Tarakan sebagai berikut :

Pemda dalam mensosialisasi kan kebijakan ini melalui penyuluhan langsung, mengenai kejelasan informasi dimana masih banyak kelompok tani yang belum paham betul akan kejelasan sanksi yang terdapat dalam kebijakan pemerintah dalam pelestarian hutan lindung.

Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan dilapangan kuantitasnya masih kurang memadai yaitu tenaga pengaman masih kurang dan pos pengaman yang disediakan belum merata di wilayah kota Tarakan ini (khususnya wilayah Utara).

Penempatan pegawai pelaksana dilapangan dalam hal ini petugas lapangan dan pengawas lapangan sudah sesuai dengan bidang dan spesialisasinya masing-masing karena mereka merupakan sarjana kehutanan, sarjan hukum dan lulusan sekolah kehutanan dan sebelumnya mereka telah mengikuti pelatihan-pelatihan.

Struktur birokrasi dimana bentuk koordinasi dan kerjasama antar pihak-pihak yang terkait dalam

pelaksanaan kebijakan pelestarian hutan lindung bagi kelompok tani seperti para petugas lapangan, kepala bidang dan sub bidang serta para staf, yang membantu sosialisasi masih berjalan dengan baik, namun masih kurangnya pengawasan hal ini disebabkan tidak adanya perhatian dari pemerintah untuk mengevaluasi program-program yang telah di jalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Edward III. George. C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar kebijakan publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kadji, Yulianto. 2008. *Implementasi kebijakan dalam perspektif realitas*. Jakarta: Cahaya Abadi.
- Putra, Fadillah. 2003. *Paradigma kritis dalam studi kebijakan publik*. Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Salusu, J. 2002. *Pengambilan Keputusan Strategik*. Jakarta: Grasindo.
- Simon. 2004. *Penerapan Strategi Hutan Rakyat opsi penyelamatan Kehancuran Hutan Negara*. Yogyakarta : Cakrawala.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Tachjan, 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.